



WALIKOTA YOGYAKARTA

**KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 618 TAHUN 2007**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH
PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA BERKUALITAS
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007-2011**



WALIKOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 618 / KEP / 2007

T E N T A N G

RENCANA AKSI DAERAH PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA BERKUALITAS KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 – 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menidaklanjuti Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011, serta untuk menjamin keberhasilan program-program pembangunan yang disusun dalam RPJMD tersebut, maka disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011;
 - b. bahwa sarana dan prasarana publik adalah layanan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam melakukan kegiatannya. Kewajiban pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi yang layak dan berkualitas;
 - c. bahwa pembangunan sarana dan prasarana berkualitas adalah bagian dari keterpaduan keseluruhan pembangunan kota serta merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah;
 - d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana berkualitas memerlukan dukungan semua pelaku pembangunan, dunia usaha serta partisipasi masyarakat, maka perlu disusun RAD Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011;
 - e. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a,b dan c diatas, perlu adanya Rencana Aksi Daerah Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perumahan dan Permukiman;
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
7. Undang-undang Nomor 17 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 – 2009;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1990 – 2010;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Yogyakarta;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA BERKUALITAS KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007-2011.
- PERTAMA : Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 adalah Dokumen Perencanaan Program Terpadu yang bersifat Lintas sektor dan lintas wilayah serta meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : RAD Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 dimaksudkan sebagai pedoman dan informasi bagi para pemangku kepentingan dalam membuat komitmen pada program prioritas yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah.

- KETIGA : Penjabaran RAD Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 akan ditindaklanjuti setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
- KEEMPAT : Menunjuk Asisten Pembangunan dibantu Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta untuk mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan program dan kegiatan pada Rencana Aksi Daerah ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Desember 2007**

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
2. Asisten Tata Praja Setda Kota Yogyakarta.
3. Asisten Pembangunan Setda Kota Yogyakarta.
4. Asisten Administrasi Setda Kota Yogyakarta.
5. Kepala SKPD se Kota Yogyakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA
YOGYAKARTA
NOMOR : 618/KEP/2007
TANGGAL : 8 DESEMBER 2007

**RENCANA AKSI DAERAH
PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA BERKUALITAS
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 - 2011**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. LINGKUP PEKERJAAN	3
BAB II GAMBARAN UMUM SARANA PRASARANA KOTA YOGYAKARTA.....	4
A. KONDISI GEOGRAFIS	4
1. Luas Wilayah	4
2. Letak Geografis	5
3. Topografi, Klimatologi, dan Penggunaan Lahan	6
B. KEPENDUDUKAN	7
C. KONDISI SARANA DAN PRASARANA SAAT INI	8
1. Jalan	9
2. Drainase	11
3. Penerangan Jalan Umum	14
4. Jaringan Air Kotor/Limbah	14
5. Jaringan Air Bersih	19
6. Persampahan	19
BAB III LANDASAN PELAKSANAAN	20
A. LANDASAN NASIONAL	20
1. UU No.4 Th 2002 tentang Perumahan dan Permukiman	21
2. UU No. 7 Th 2004 tentang Sumber Daya Air	21
3. UU No.26 Th 2007 tentang Penataan Ruang	21
4. RPJPN 2005-2025	21
5. RPJMN 2005-2009	23
B. LANDASAN REGIONAL	24
1. RPJPD 2007-2026	24
2. RPJMD 2007-2011	25
BAB IV RENCANA AKSI PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA KOTA YOGYAKARTA	27

A. PRIORITAS	27
B. UPAYA DAN RENCANA AKSI	29
C. MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN	39
BAB V PELAKSANAAN	41
A. MEKANISME	41
B. PENDANAAN	41
C. KELEMBAGAAN	42
D. INDIKATOR	42
BAB VI PENUTUP	44

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akhir abad dua puluh keterpurukan perekonomian yang terjadi di Indonesia tidak dapat terelakkan dan berdampak pada kemerosotan kemampuan finansial pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, dalam menyelenggarakan pembangunan sarana prasarana yang berkualitas di Kota Yogyakarta sekaligus berdampak pada kinerja sektor sarana prasarana. Selanjutnya seiring dengan perubahan kondisi sosial politik yang diantaranya mengamanatkan desentralisasi di dalam menyelenggarakan tugas pembangunan, maka penyelenggaraan pembangunan sarana prasarana yang berkualitas mulai menerapkan secara intensif pola pembangunan yang terdesentralisasi.

Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Propinsi DI. Yogyakarta, Kota Yogyakarta merupakan sentral dari segala kegiatan terutama di bidang pelayanan jasa sehingga banyak orang yang berdatangan ke wilayah ini. Hal ini tentu saja dibutuhkan suatu sarana prasarana yang berkualitas dan memadai.

Visi Kota Yogyakarta tahun 2007 – 2011 sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2007 – 2011 adalah "*Kota Yogyakarta Sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya Dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berwawasan Lingkungan*".

Untuk mendukung visi pembangunan Kota Yogyakarta dengan harapan untuk mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kota Yogyakarta serta tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mewujudkan visi pembangunan ditempuh salah satunya dengan misi pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas melalui pembangunan infrastruktur yang maju dengan meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan peningkatan iptek, peningkatan daya dukung kapasitas kota dengan pengembangan dan pemanfaatan aset-aset daerah, sarana dan prasarana kota serta fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan mengacu pada strategi pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta maka pembangunan sarana prasarana yang berkualitas menunjang di setiap tematik tahapan pembangunan.

Tindakan-tindakan pembangunan sarana prasarana selanjutnya diwadahi dalam dokumen Rencana Aksi Daerah yang berlaku untuk periode lima tahunan, yaitu dokumen daerah yang disusun melalui proses koordinasi dan partisipasi stake holder yang memuat landasan, prioritas, rencana aksi serta mekanisme pelaksanaan dan kelembagaannya bagi terlaksananya pembangunan sarana prasarana di daerah.

Rencana Aksi Daerah Pembangunan Sarana Prasarana secara substansi merupakan kumpulan program kegiatan yang komprehensif dan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan dan tanggungjawab semua pihak yang terkait.

RAD pembangunan sarana prasarana berisi prioritas dan strategi pemerintah daerah dalam rangka membangun sarana prasarana yang berkualitas.

Kebijakan pembangunan sarana prasarana dilakukan dengan pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan atau komunitas. Diharapkan akan tercipta Kota Yogyakarta yang bersih, sehat, indah dan nyaman yang dimulai dari lingkungan wilayah/ kampung. Melalui pendekatan ini, maka partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilannya.

Sesuai konteks Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta, maka pembangunan sarana prasarana akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, yang dalam hal ini difasilitasi bersama melalui Sekretariat Bersama Kartamantul. Penyediaan sarana prasarana air bersih perpipaan, drainase, jalan dan transportasi, manajemen pengelolaan sampah, optimalisasi Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dan penataan ruang perkotaan, akan menjadi kunci penting lima tahun mendatang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas dimaksudkan untuk:

1. Menjadi landasan dan strategi yang kuat untuk pedoman dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kegiatan dan program prioritas pembangunan sarana dan prasarana daerah yang berkualitas.
2. Merumuskan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana daerah yang berkualitas.

Mewujudkan pembangunan prasarana dan sarana berkualitas dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Tersedianya sarana dan prasarana dasar publik yang memadai.
2. Meningkatnya kualitas penataan kawasan sesuai peraturan
3. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas sarana prasarana publik.
4. Meningkatnya fungsi kampung sebagai tempat berinteraksi masyarakat yang utuh.
5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana-prasarana dasar permukiman dan perkotaan
6. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat.
7. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) dan ruang publik yang cukup nyaman dan indah sebagai tempat bermain dan rekreasi keluarga.

Adapun tujuan penyusunan RAD Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas ini adalah:

1. Menyusun strategi dan prioritas pembangunan Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas yang tertuang di dalam dokumen Rencana Aksi Daerah dengan melibatkan seluruh unsur pembangunan.
2. Memasukkan aspek-aspek Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas ke dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan, termasuk kebijakan dan perencanaan sektoral

3. Merumuskan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas yang implementatif, terarah, terpadu dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas.

C. LINGKUP PEKERJAAN

Rencana Aksi Daerah Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas Kota Yogyakarta merupakan dokumen daerah yang memuat landasan, prioritas, rencana aksi serta mekanisme pelaksanaan dan kelembagaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas. Dokumen ini mengakomodasi kepentingan dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan terkait dan disusun melalui proses koordinasi dan partisipasi yang mengacu pada dokumen nasional dan daerah tentang pembangunan sarana dan prasarana.

BAB II
GAMBARAN UMUM SARANA DAN PRASARANA
KOTA YOGYAKARTA

A. KONDISI GEOGRAFIS

1. Luas Wilayah

Luas wilayah Kota Yogyakarta adalah 3.250,00 Ha atau 32,50 Km² (1,02 % dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan jarak terjauh dari utara ke selatan kurang lebih 7,50 Km dan dari barat ke timur kurang lebih 5,60 Km. Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 614 RW dan 2.523 RT. Penggunaan lahan paling banyak diperuntukkan bagi perumahan, yaitu sebesar 2.103,27 Ha dan bagian kecil berupa lahan kosong seluas 20,20 Ha. Kecamatan Umbulharjo merupakan kecamatan yang wilayahnya paling luas yaitu 812,00 Ha atau sebesar 24,98 % dari luas Kota Yogyakarta, sedangkan kecamatan yang wilayahnya paling sempit adalah Kecamatan Pakualaman dengan luas 63,00 Ha (1,94 %).

Adapun luas masing-masing kecamatan di Kota Yogyakarta sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Tahun 2006 Kota Yogyakarta

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Km ²	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Mantrijeron	1.Gedongkiwo	0.90	18	86
		2.Suryodiningratan	0.85	17	69
		3.Mantrijeron	0.86	20	75
			2.61	55	230
2.	Kraton	1.Patehan	0.40	10	44
		2.Panembahan	0.66	18	78
		3.Kadipaten	0.34	15	53
			1.40	43	175
3.	Mergangsan	1.Brontokusuman	0.93	23	83
		2.Keparakan	0.53	13	57
		3.Wirogunan	0.85	24	76
			2.31	60	216
4.	Umbulharjo	1.Giwangan	1.26	13	42
		2.Sorosutan	1.68	16	63
		3.Pandeyan	1.38	12	46
		4.Warungboto	0.83	9	38
		5.Tahunan	0.78	11	48
		6.Muja Muju	1.53	12	55
		7.Semaki	0.66	10	34
			8.12	83	326
5.	Kotagede	1.Prenggan	0.99	13	57
		2.Purbayan	0.83	14	58
		3.Rejowinangun	1.25	13	49
			3.07	40	164
6.	Gondokusuman	1.Baciro	1.06	21	88
		2.Demangan	0.74	12	44

		3.Klitren	0.68	16	63
		4.Kotabaru	0.71	4	21
		5.Terban	0.80	12	59
			3.99	65	275
7.	Danurejan	1.Suryatmajan	0.28	15	45
		2.Tegalpanggung	0.35	16	66
		3.Bausasran	0.47	12	49
			1.10	43	160
8.	Pakualaman	1.Purwokinanti	0.30	10	47
		2.Gunungketur	0.33	9	36
			0.63	19	83
9.	Gondomanan	1.Prawirodirjan	0.67	18	61
		2.Ngupasan	0.45	13	49
			1.12	31	110
10.	Ngampilan	1.Notoprajan	0.37	8	50
		2.Ngampilan	0.45	13	70
			0.82	21	120
11.	Wirobrajan	1.Patangpuluhan	0.44	10	51
		2.Wirobrajan	0.67	12	58
		3.Pakuncen	0.65	12	56
			1.76	34	165
12.	Gedongtengen	1.Pringgokusuman	0.46	23	89
		2.Sosromenduran	0.50	14	55
			0.96	37	144
13.	Jetis	1.Bumijo	0.58	13	55
		2.Gowongan	0.46	13	52
		3.Cokrodiningratan	0.66	11	60
			1.70	37	167
14.	Tegalrejo	1.Tegalrejo	0.82	12	46
		2.Bener	0.57	7	25
		3.Kricak	0.82	13	61
		4.Karangwaru	0.57	14	56
			2.91	46	188
	Jumlah	45	32,50	614	2.523

Sumber Data : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta.

2. Letak Geografis

Letak geografis Kota Yogyakarta diantara 110° 24' 19" dan 110° 28' 53" Bujur Timur (BT), 7° 49' 26" dan 7° 15' 24" Lintang Selatan (LS) dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut. Wilayah Kota Yogyakarta sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sleman, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Sleman, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Sleman. Ditinjau dari faktor geografis permasalahan yang dialami Kota Yogyakarta berasal dari dua faktor, yaitu faktor bawaan daerah dan manusia. Faktor bawaan daerah adalah faktor-faktor yang dimiliki daerah dan daerah tidak sepenuhnya mampu mengendalikan. Faktor bawaan daerah tersebut antara lain letak geografis Kota Yogyakarta yang berdekatan dengan gunung berapi dan Samudera Indonesia. Geomorfologi Kota Yogyakarta tersebut memberikan keuntungan daerah, namun di sisi lain juga menimbulkan masalah terkait dengan risiko terjadinya bencana alam gempa bumi vulkanik maupun tektonik.

3. Topografi , Klimatologi Dan Penggunaan Lahan

a. Topografi

Kota Yogyakarta yang terletak di daerah dataran lereng Gunung Merapi memiliki kemiringan lahan yang relatif datar (antara 0-2%) dan berada pada ketinggian rata-rata 114 meter dari permukaan air laut (dpa). Sebagian wilayah dengan luas 1.657 Ha terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya 1.593 Ha berada pada ketinggian antara 100-119 meter dpa.

Sebagian besar jenis tanahnya adalah regosol. Terdapat 3 sungai yang mengalir dari arah utara ke selatan yaitu Sungai Gajah Wong yang mengalir di bagian timur kota, Sungai Code di bagian tengah dan Sungai Winongo di bagian barat kota.

Ketinggian wilayah Kota Yogyakarta dari permukaan air laut dapat dibagi menjadi dua kelas yaitu ketinggian < 100 m dan 100 – 199 m dari permukaan laut. Ketinggian < 100 m dari permukaan laut seluas 1.657 ha atau 51,98 % dari luas wilayah terdapat di Kecamatan Mantrijeron, Kraton, Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Gondomanan, Ngampilan dan Wirobrajan. Ketinggian 100 – 119 m dari permukaan laut seluas 1.593 Ha atau 49,02 % dari luas wilayah, terdapat di Kecamatan Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Gondokusuman, Danurejan, Pakualaman, Gondomanan, Ngampilan, Wirobrajan, Gedong-tengen, Jetis dan Tegaltrejo.

b. Klimatologi

Secara umum rata-rata curah hujan tertinggi selama Tahun 2006 terjadi pada bulan Maret yaitu sebanyak 387,5 mm dan terendah terjadi pada bulan Juni sampai dengan September yaitu 0 mm. Rata-rata hari hujan per bulan 11,08 hari hujan, suhu rata-rata 27,8°C dan kelembaban udara rata-rata cukup tinggi terjadi pada bulan Maret sebesar 87% dan terendah pada bulan Juni sampai dengan September sebesar 72%. Angin pada umumnya bertiup angin muson dan pada musim hujan bertiup angin barat daya dengan arah 240° bersifat basah dan mendatangkan hujan, pada musim kemarau bertiup angin muson tenggara yang agak kering dengan arah $\pm 90^\circ - 140^\circ$ dengan rata-rata kecepatan 2-3 knot/jam.

c. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan dibedakan menurut jenisnya meliputi perumahan, jasa, perusahaan, industri, pertanian, kosong diperuntukan (DPK) dan lain-lain. Dominasi penggunaan lahan untuk Kota Yogyakarta pada tahun 2005 adalah untuk perumahan, sedangkan penggunaan lahan secara lengkap adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Luas Penggunaan Tanah Berdasarkan Status Peruntukan Lahan Tahun 200
di Kota Yogyakarta

No	Kecamatan	JENIS PENGGUNAAN TANAH (HA)							Jumlah
		Perumahan	Jasa	Perusahaan	Industri	Pertanian	Kosong DPK	Lain-lain	
1	Mantrijeron	200,8500	9,1500	12,6399	0,4880	4,5577	0,0914	33,2260	261,0000
2	Kraton	104,4575	11,2000	8,3500	-	-	-	15,9925	140,0000
3	Mergangsan	156,4406	15,9578	19,5093	1,6000	5,5319	0,1732	31,8250	231,0000
4	Umbulharjo	509,3712	52,2018	35,3300	17,8800	80,2487	16,4770	105,0408	812,0000
5	Kotagede	221,8490	8,5600	16,5785	10,6457	18,0918	0,9962	30,2788	307,0000
6	Gondokusuman	228,0733	69,1600	58,3547	6,3400	0,0291	0,4152	36,6277	399,0000
7	Danurejan	49,8150	16,9600	30,2400	0,3200	-	-	12,6650	110,0000
8	Pakualaman	34,5975	11,0400	5,7500	0,3200	-	0,3200	10,9725	63,0000
9	Gondomanan	47,2495	29,5380	21,8800	1,5200	-	-	11,8125	112,0000
10	Ngampilan	62,2250	3,3600	4,1785	-	-	0,4800	11,7565	82,0000
11	Wirobrajan	136,4522	7,2300	14,7200	0,6000	0,5648	-	16,4330	179,0000
12	Gedongtengen	66,8790	3,6800	14,4085	-	-	-	11,0325	96,0000
13	Jetis	105,9486	18,2296	22,8296	2,8800	-	0,5449	19,5673	170,0000
14	Tegalrejo	183,5689	18,4019	8,2556	9,6400	29,4966	0,7108	40,9302	291,0000
	Jumlah (Ha)	2.103,2720	274,6691	273,0246	52,2337	138,5176	20,2087	388,1603	32.500,0000

Sumber Data : - Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
- Berdasarkan Status Peruntukan Lahan.

B. KEPENDUDUKAN

Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Persebaran penduduk yang tidak merata persebarannya perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan daya dukung lingkungan yang tidak seimbang antara Kabupaten atau Kota. Oleh karena itu dibutuhkan persebaran penduduk yang lebih merata dari wilayah yang padat penduduknya ke wilayah yang jarang penduduknya atau rendah tingkat kepadatannya.

Selama tahun 2005-2006 Kota Yogyakarta merupakan kota yang kepadatan penduduknya paling tinggi apabila dibandingkan dengan daerah lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2006 kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta mencapai 16.098 orang per Km².

Tabel 2.3
Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2005 dan 2006
Di Kota Yogyakarta

NO.	Kecamatan	Kepadatan Penduduk(jiwa/Km2)	
		2005	2006
1.	Mantrijeron	15.642	15.756
2.	Kraton	21.303	21.394
3.	Mergangsan	18.373	18.533
4.	Umbulharjo	9.023	9.156
5.	Kotagede	10.366	10.511

6.	Gondokusuman	18.904	18.998
7.	Danurejan	28.660	28.825
8.	Pakualaman	23.856	23.997
9.	Gondomanan	15.888	16.034
10.	Ngampilan	28.915	29.074
11.	Wirobrajan	17.720	17.839
12.	Gedongtengen	27.864	27.907
13.	Jetis	22.386	22.478
14.	Tegalrejo.	14.208	14.385
Kepadatan Kota		15.969	16.098

Sumber : BKKBC Kota Yogyakarta

C. KONDISI SARANA DAN PRASARANA SAAT INI

Pembangunan infrastruktur adalah bagian integral dari pembangunan kota merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi infrastruktur seperti jaringan jalan, jaringan transportasi, jaringan drainase, persampahan, sumber daya air dan pelayanan air bersih, jaringan air limbah serta sarana dan prasarana lainnya masih belum mengimbangi perkembangan dinamika masyarakat terutama di wilayah pengembangan. Berkurangnya kualitas infrastruktur dan tertundanya pembangunan infrastruktur akan memperlambat perekonomian daerah.

Dilain pihak, pembangunan sarana dan prasarana dasar perumahan dapat digunakan untuk mendukung kelengkapan standar pelayanan minimal lingkungan yang berkelanjutan seperti ketersediaan air bersih, jalan lingkungan, saluran drainase, pengelolaan limbah, ruang terbuka hijau, fasilitas umum dan sosial serta fasilitas ekonomi lokal.

1. Jalan

Kapasitas jalan dan kemampuan jalan di beberapa ruas jalan sudah melebihi kapasitas, hal ini nampak dari terjadinya antian panjang dan diperberat dengan adanya parkir pada badan jalan serta sulit memperlebar jalan karena adanya keterbatasan lahan.

Tabel. 2.4
Kondisi Jalan Kota Yogyakarta Tahun 2006 (Meter)

Total Panjang	Jenis Perkerasan					Kondisi Jalan		
	Aspal		Penetrasi Macadam	Sand Sheet	Cone Blik	Baik	Sedang	Rusak
	HRS	AC						
238.107,70	166.361,90	13.282,53	22.143,60	35.883,67	436,00	86.990,75	107.873,35	43.243,60

Sumber Data :Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta

Tabel. 2.5
Menurut jenis Permukaan dan Status Jalan

Jenis Permukaan Jalan	Status Jalan							
	Jalan Negara		Jalan Propinsi		Jalan Kab/ Kota		Jalan Lingkungan	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
a. Diaspal	18.132	18.132	3.733	3.773	213.500,1	215.964,1	92.926	96.259,1
b. Perkerasan (conblok, kerikil, cor beton)			-		22.385,6	22.143,6	138.427	146.392,3
c. Tanah	-		-		-		5.339	
d. Tidak dirinci	-		-		-		-	
JUMLAH	18.132	18.132	3.733	3.733	235.885,7	238.107,7	236.439	242.651,4

Sumber Data :Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta

Tabel. 2.6
Menurut Kondisi dan Status Jalan

Kondisi Jalan	Status Jalan							
	Jalan Negara		Jalan Propinsi		Jalan Kab/ Kota		Jalan Lingkungan	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
a. Baik	14.610	17.575	-		100.796,6	215.964,1	62.983,80	74.282,2
b. Sedang	3.522	557	2.788	2.788	102.597,1	22.143,6	193.165,40	192.910,4
c. Rusak	-		945	945	32.492		9.004,80	
d. Rusak Berat	-		-				-	
JUMLAH	18.132	18.132	3.733	3.733	235.885,7	238.107,7	265.154,00	

Sumber Data :Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta

Tabel. 2.7
Menurut Kelas Jalan

KELAS JALAN	STATUS JALAN							
	JALAN NEGARA		JALAN PROPINSI		JALAN KAB/KOTA		JALAN LINGKUNGAN	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
a. Kelas I	18.132	18.132	-		13.071	13.071	-	
b. Kelas II	-		-		1.769	1.769	-	
c. Kelas III	-		3.733	3.733	26.220	26.220	-	
d. Kelas III A	-		-		166	166	1.018	

e. Kelas III B	-		-		14.391	14391	-	
f. Kelas III C	-		-		14.391	14.391	454	
g. Kelas Tidak dirinci	-		-		165.877,7	168.099,7	232,373	
JUMLAH	18.132	18.132	3.733	3.773	235.885,7	238.107,7	234,373	
(satuan dalam meter)								

Sumber Data :Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta

2. Drainase

Jaringan drainase di Kota Yogyakarta merupakan satu kesatuan sistem jaringan drainase perkotaan yogyakarta, karena dinamika perubahan penggunaan lahan yang terjadi kiranya dimensi dan sistem drainase yang ada saat ini perlu penyesuaian melalui penyempurnaan sistem jaringan drainase perkotaan yogyakarta yang mencakup batas administrasi Kota Yogyakarta, sebagian wilayah Sleman dan Bantul.

Sarana Drainase untuk seluruh wilayah Kota Yogyakarta meliputi drainase utama berupa Sungai Gadjahwong, Sungai Winongo dan Sungai Code, saluran drainase sekunder (pembawa) tertutup, saluran drainase sekunder (pembawa) terbuka, saluran tersier (pengumpul) tertutup, saluran tertier (pengumpul) terbuka. Seluruh sirkulasi drainase disalurkan menuju ke saluran drainase utama berujud ketiga sungai diatas.

Permasalahan timbulnya genangan bahkan banjir di musim hujan tidak hanya disebabkan belum sempurnanya sistem sirkulasi drainase yang ada namun juga dapat diakibatkan oleh tersumbatnya aliran akibat pembuangan sampah atau kurang sempurnanya tangkapan air bahkan dimungkinkan akibat curah hujan yang sangat tinggi. Saluran drainase selain memerlukan pemeliharaan fisik juga perlu adanya kegiatan pelumpuran atau membersihkan saluran drainase dari endapan lumpur.

Tabel. 2.8
Daftar Saluran Air Hujan Di Kota Yogyakarta

No	Saluran Air Hujan	Panjang (M)			Keterangan
		2005	2006	2007	
1	Saluran Air Hujan Terbuka	90.790	90.909	90.909	
2	Saluran air Hujan Tertutup	140.725	141.029	141.067,5	
3	Duiker/ Gorong-gorong	3.837	3.865,5	3.865,5	

Sumber Data :Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta

Tabel. 2.9
Daftar Lokasi Genangan dan Rawan Genangan di Kota Yogyakarta

No.	Daerah Genangan 2007	Daerah Rawan Genangan
1	Pakuncen	Pakuncen
2	Prawirodirjan	Prawirodirjan
3	Klitren	Jl Tut Harsono
4	Jl. Bimasakti	Klitren
5	Tahunan	Jl Veterean
6	Kotagede	Taman Makam Pahlawan
7	Giwangan	Jl Bima Sakti
8	Jl. Parangtritis	Prawirodirjan
9	Jl. Soka	Jl FM Noto
10	Perempatan Gondomanan	Jl Mongisidi
11	Jl. DI Panjaitan	Tahunan
12		Jl Kemasan Kotagede
13		Giwangan
14		Pasar Kranggan Jl Diponegoro
15		Jl Parangtritis
16		Jl Soka
17		Perempatan Gondomanan
18		Jl DI Panjaitan

Tabel. 2.10
Kondisi Talud Sungai Winongo, Code Dan Gajahwong

Sungai	Konstruksi	Kondisi 2005 (dalam meter)				Kondisi 2006 (dalam meter)			
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
Code	Cor Beton	33,0	128,0			33,0	128,0		
	Ps. Batukali	11.480,0		272,0		11.480,0		272,0	
	Ps. Batukali+ Bronjong	827,5				827,5			
	Tanah								
	Bronjong	235,0				235,0			
	Sub Total Panjang	12..575,5	128,0	272,0		12..575,5	128,0	272,0	
Gajahwong	Ps. Batu Putih	124,2				124,0			
	Batu Kosong								
	Bronjong	197,0				397,0			
	Karung Plastik	40,0	5,0			40,0	5,0		
	Ps. Batako	100,0				100,0			
	Ps. Batubata	81,0				81,0			
	Ps. Batu kali + Bronjong	227,5		40,0		227,0		40,0	
	Tanah	3.174,0				2.974,0			
	Tanah+ Bronjong	172,0				172,0			
	Tanah + Sampah								
	Ps. Batukali	2.057,0		71,5		2.057,0		71,5	
	Sub Total Panjang	6.172,7	5,0	111,5		6.372,7	5,0	111,5	

Winongo	Tanah + sampah				504,0				504,0
	Beton	21,0				21,0			
	Bronjong	194,0				194,0			
	Buis Beton	79,5				79,5			
	Ps. Batu Kali	5.844,1	375,0	139,0		5.844,1	375,0	139,0	
	Ps. Batu Putih	110,0				110,0			
	Tanah	100,0			746,0	100,0			746,0
	Tanah Padas								
	Sub Total Panjang	6.348,6	375,0	139,0	1.250,0	6.348,6	375,0	139,0	1.250,0
	Total Panjang	25.096,8	508,0	522,5	1.250,0	25.296,8	508,0	522,5	1.250,0

Sumber Data :Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta

3. Penerangan Jalan Umum

Kota Yogyakarta dengan luas wilayah 32,5 km², terbagi dalam 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan, sebagai Ibukota Propinsi DIY, mempunyai 467 ruas jalan dengan panjang 441.231 km yang dilayani LPJU non kampung. Sampai saat ini kondisi PJU terdiri dari

Tabel. 2.11
Penerangan jalan Umum

No	Uraian	Satuan	Volume		Keterangan
			2005	2006	
Penerangan Jalan Umum					
1	Penerangan Jalan Utama	Titik	7.500	7.625	
	Penerangan Jalan:				
2	Lampu Lingkungan	Titik	4.500	5.325	
3	Lampu Antik	Titik	3.000	3.000	

Sumber Data :Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta

Pemerintah Kota melalui Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta sejak tahun 2001 sudah melaksanakan program efisiensi penggunaan energi lampu penerangan jalan umum dengan tujuan :

1. Penghematan pemakaian energi listrik.
2. Menjaga Kontinuitas Nyala Lampu/Sistem.
3. Meratakan titik Penerangan Jalan Umum.
4. Menambah volume Lampu Penerangan Jalan Umum
5. Menghemat biaya Pembayaran Rekening Listrik.
6. Menghemat biaya operasional dan pemeliharaan
7. Meningkatkan dan menunjang wisata malam hari.
8. Mengurangi emisi CO₂ dari penggunaan energi listrik.

4. Jaringan Air Kotor/Limbah

Penanganan limbah domestik di Kota Yogyakarta dengan sistem terpusat, sistem komunal dan setempat. Sistem terpusat dialirkan melalui jaringan riol menuju IPAL Sewon dan mencakup pelayanan kurang lebih 25% penduduk kota, sedangkan bagi penduduk yang wilayahnya tidak terjangkau oleh jaringan air limbah Pemerintah Kota Yogyakarta membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal dan Septic Tank Komunal. Septic Tank Komunal dimaksudkan untuk mengolah air limbah domestik maksimal untuk 5 orang KK sedangkan IPAL Komunal dimaksudkan untuk mengolah air limbah domestik minimal dari 50 KK. Pembangunan dengan sistem komunal ini disebabkan oleh terbatasnya lahan yang ada di Kota Yogyakarta dan juga karena air tanah yang sudah tercemar.

Penanganan limbah domestik di Kota Yogyakarta dengan sistem terpusat, sistem komunal dan setempat. Sistem terpusat dialirkan melalui jaringan riol menuju ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sewon dan mencakup pelayanan kurang lebih 25% penduduk kota, sedangkan lainnya menggunakan sistem setempat yaitu menggunakan septic tank dan sumur peresapan untuk pembuangan limbah dari tiap persil rumah tangga. Saat ini dikembangkan pembuangan sistem komunal bagi lokasi permukiman yang tidak bisa terjangkau oleh jaringan air kotor limbah seperti di dekat bantaran sungai. Sistem komunal ini merupakan pengolahan limbah sederhana berupa bak-bak pengendapan dan sumur peresapan. Penggunaan sistem komunal digunakan untuk pembuangan dari suatu kelompok yang terdiri dari beberapa rumah tangga (untuk septic tank maksimal 5 KK dan untuk IPAL Komunal minimal 6 KK). Sistem ini dirasa lebih efektif untuk pemukiman penduduk di Kota Yogyakarta yang tidak dapat terjangkau oleh jaringan air limbah dan lahan terbatas yang dimiliki oleh penduduk. Pembangunan dengan sistem komunal ini disebabkan oleh terbatasnya lahan yang ada di Kota Yogyakarta dan juga karena air tanah yang sudah tercemar oleh bakteri E. Colli.

Hingga saat ini jaringan air limbah yang ada berupa sambungan rumah 14.509 unit. Tingkat pelayanan dan kondisi sarana-prasarana dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.12
Tingkat Pelayanan dan Kondisi Sarana – Prasarana Air Limbah

Uraian	Keterangan
Air Limbah Terpusat:	
- Tingkat pelayanan (Ha)	626
- Tingkat Pelayanan (%)	25
- Penduduk Terlayani	84.000
Panjang pipa air limbah (m)	
- Lateral	129.227,39
- Induk	31.443,35
- Penggelontor	19.714,20

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Untuk penggelontoran saluran air kotor Pemerintah Daerah memiliki satu bendung di Sungai Winongo bendung Bendolole, Sungai Code dan suplai dari Selokan Mataram dari Sungai Belik.

Pelayanan air limbah secara bertahap akan ditingkatkan melayani 53% wilayah perkotaan Yogyakarta sampai dengan tahun 2012 atau melayani 237.000 penduduk.

Di Kota Yogyakarta digunakan 3 (tiga) sistem pengolahan air limbah domestik yang meliputi:

- a. Sistem Terpusat / Off Site
Pengelolaan air limbah domestik dimana air limbah dialirkan melalui jaringan perpipaan menuju satu instalasi pengolahan (IPAL Sewon)
- b. Sistem Komunal
Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem septick tank komunal.
- c. Sistem Individual / On site
Air limbah domestik langsung diolah disumbernya (dengan septic tank individual).

Sistem terpusat akan menjangkau \pm 1250 hektar daerah pelayanan atau 110.000 penduduk dengan jumlah titik sambungan 10.400 SR (Sambungan Rumah).

IPAL Sewon terletak di Kabupaten Bantul \pm 6 km sebelah barat daya pusat Kota Yogyakarta, dengan luas lahan 6,7 Ha. IPAL ini terletak di Dusun Cepit, Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kapasitas IPAL Sewon :

- a. IPAL Sewon dioperasikan dengan efisiensi pengolahan yang tinggi (95%).
- b. Kapasitas IPAL Sewon saat ini baru dimanfaatkan sekitar 50% dari kapasitas desain, yaitu 10.000 pelanggan dari kapasitas desain sebesar 18.400 pelanggan.
- c. Cakupan pelayanan IPAL Sewon : seluruh Kota Yogyakarta, sebagian Kabupaten Sleman bagian selatan (5 Kecamatan) dan sebagian Kabupaten Bantul bagian utara (3 Kecamatan).
- d. Pelayanan IPAL akan ditingkatkan secara bertahap sampai tahun 2012 diharapkan dapat melayani 59 % wilayah perkotaan Yogyakarta atau 273.000 penduduk (53 % penduduk kota).

Tabel. 2.13
Data Jaringan Air Limbah Kota Yogyakarta Tahun 2005 Dan 2006

No.	Kecamatan	2005 (Meter)	2006 (Meter)	Keterangan
1	Mantrijeron	14.199,85	14.366,85	
2	Kraton	26.212,70	26.212,70	
3	Mergangsan	30.366,43	30.366,43	
4	Umbulharjo	10.684,55	10.684,55	
5	Kotagede	--	--	
6	Gondokusuman	10.709,16	10.709,16	
7	Danurejan	10.048,25	10.048,25	

8	Pakualaman	10.121,47	10.121,47	
9	Gondomanan	20.050,50	20.050,50	
10	Ngampilan	9.360,97	9.360,97	
11	Wirobrajan	--	--	
12	Gedongtengen	13.737,06	13.737,06	
13	Jetis	20.879,00	20.879,00	
14	Tegalrejo	4.048,00	4.048,00	
	Jumlah	180.584,94	180.584,94	

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yk

Tabel. 2.14
Data Inventarisasi Riool Kota Yogyakarta Tahun 2005-2006

No.	Kondisi Pada Tahun	Jenis Saluran (meter)				
		Pengglontor	Induk	Lateral	Total Panjang	Manhole
1	2005	19.714,20	31.443,35	128.751,34	179.908,89	4.925,00
2	2006	19.714,20	31.443,35	129.227,39	180.384,94	4.956,00

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Tabel. 2.15
IPAL Komunal Domestik
Yang berada di Bantaran Sungai di Kota Yogyakarta

No	Nama sungai	Lokasi	Satuan	Jumlah Kepala Keluarga
1.	Gajah Wong	Kelurahan Prenggan	1	50-60
		Kelurahan Warungboto	1	50-60
		Kelurahan Pandeyan	1	50-60
		Kelurahan Muja-muju	2	50-60
		Kelurahan Giwangan	2	50-60
2.	Code	Kelurahan	2	50-70
		Cokrodiningratan	1	50-60
		Kelurahan Prawirodirjan	1	50-60
		Kelurahan Wirogunan	1	50-60
		Kelurahan Brontokusuman	1	50-60
		Kelurahan Suryatmajan	1	50-60
		Kelurahan Purwokinanti	1	50-60

3.	Winongo	Kelurahan Notoprajan	1	50-60
		Kelurahan Wirobrajan	1	50-60
		Kelurahan Tegalrejo	1	50-60
		Kelurahan Bumijo	1	50-60
		Kelurahan	1	50-60
		Pringgokusuman	1	50-60
		Kelurahan Patangpuluhan	2	50-60
		Kelurahan Pakuncen	1	50-60
		Kelurahan Gedongkiwo	1	50-60
		Kelurahan Bener	1	50-60
		Kelurahan Kricak		

Sumber Data : Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pemakaman Kota Yogyakarta

5. Jaringan Air Bersih

Sumber air yang digunakan untuk air bersih sistem perpipaan meliputi mata air sebanyak 2 buah (umbul wadon dan karanggayam I), air permukaan sebanyak 1 buah (padasan), sumur dalam sebanyak 29 buah dan sumur dangkal sebanyak 8 buah. Sebagian besar lokasi sumber air berada di Kabupaten Sleman.

Kualitas air non perpipaan (sumur dangkal) tidak memenuhi persyaratan sebagai air minum, karena kandungan bakteri coli yang cukup tinggi, meskipun secara fisik dan kimia air tersebut memenuhi persyaratan.

Pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan melalui PDAM Tirta Marta untuk masyarakat Kota Yogyakarta seperti terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel. 2.16
Kapasitas Terpasang/ Produksi, Kapasitas Terpakai/Distribusi
dan Jumlah Pelanggan PDAM Tirta Marta
Kota Yogyakarta s.d tahun 2006

NO	URAIAN	Satuan	2005	2006
1.	Produksi Air	M3/dt	18430031,00	11932177,00
2.	Distribusi air	M3/dt	15586862,50	11007270,50
3	Jumlah Pelanggan	Unit	34583	34513

Sumber : PDAM Tirtamarta Yogyakarta

Tabel. 2.17
Perkembangan Air Minum Tahun 2005 dan 2006
di Kota Yogyakarta

NO	Kecamatan	Sumur Gali		Sumur Pompa		Jml Pelanggan PDAM	
		2005	2006	2005	2006	2005	2006
1	Mantrijeron	3.777	3.779	57	57	1610	1600
2	Kraton	1.997	1.997	9	8	1948	1948
3	Mergangsan	3.897	3.897	15	15	1808	1788
4	Umbulharjo	8.416	8.419	104	104	2600	2583

5	Kotagede	3.338	3.340	39	39	864	845
6	Gondokusuman	3.355	3.355	20	20	2918	2908
7	Danurejan	814	814	81	81	1904	1889
8	Pakualaman	766	766	22	22	976	969
9	Gondomanan	1.256	1.256	3	2	1054	1047
10	Ngampilan	999	999	9	9	2003	1997
11	Wirobrajan	1.553	1.553	148	145	1744	1741
12	Gedongtengen	534	534	70	70	2183	2165
13	Jetis	318	318	215	215	4035	4053
14	Tegalrejo	3.250	3.253	135	135	3249	3274
JUMLAH		34.270	34.280	2.810	2.805	28896	28807

Sumber Data : Dinas Kesehatan dan PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta

6. Persampahan

Pengelolaan sampah di wilayah Kota Yogyakarta dengan mekanisme pembuangan dari rumah tangga ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS)/Transfer Depo dan selanjutnya dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa dilakukan pemilahan sampah terlebih dahulu. Pola pembuangan sampah yang ada saat ini masih menggunakan pola lama, yaitu kumpul – angkut – buang.

Tingkat pelayanan pengelola sampah sistem terpusat sebanyak 83%. Jumlah sampah pada tahun 2005 kurang lebih 1.567 m³/hari. Dengan sarana dan prasarana persampahan yang ada jumlah sampah yang dapat dibuang ke TPA kurang lebih 1.375 m³/hari atau sebesar 87,75% dari volume sampah.

Karena adanya keterbatasan lahan di Kota Yogyakarta sehingga tidak mempunyai lokasi untuk TPA. Untuk mengatasi hal tersebut diadakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul mengenai lahan pembuangan akhir sampah yang terletak di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul. TPA Piyungan Bantul ini menerima pembuangan sampah dari 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul serta dari Kota Yogyakarta. Prosentase pembuangan sampah yang terbesar pada TPA Piyungan tersebut berasal dari Kota Yogyakarta. Mekanisme pembiayaan pemeliharaan TPA ini dengan cara sharing dana Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Propinsi Di Yogyakarta dengan melibatkan Sekretariat bersama Kartamantul. Selanjutnya diperlukan suatu wujud nyata pengelolaan sampah dengan sistem reduce, reuse, recycle dan revalue untuk mengurangi produksi sampah di Kota Yogyakarta mengingat volume sampah untuk daerah perkotaan akan selalu bertambah dari waktu ke waktu baik volume maupun jenis sampah. Hal ini juga dapat mengurangi pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta jika diterapkan dengan serius.

Tabel. 2.18
Sarana Kebersihan Kota Yogyakarta Tahun 2004 -2005

No	Kecamatan	Transfer Depo		Container		Gerobag	
		2004	2005	2004	2005	2004	2005
1	Mantrijeron	1	2	7	8	56	56
2	Kraton	1	1	7	8	54	54
3	Mergangsan	-	-	5	6	52	52
4	Umbulharjo	-	-	3	4	66	71
5	Kotagede	1	1	4	5	41	41
6	Danurejan	-	-	3	4	45	30
7	Gondokusuman	2	2	8	10	52	57
8	Pakualaman	2	2	2	2	37	37
9	Gondomanan	2	2	3	3	34	34
10	Ngampilan	1	1	3	4	38	38
11	Wirobrajan	-	-	1	2	43	43
12	Gedongtengen	1	1	5	5	53	53
13	Jetis	-	-	3	3	50	50
14	Tegalrejo	1	1	2	2	35	42
	Jumlah	12	13	56	66	656	658

Sumber Data : Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pemakaman Kota Yogyakarta

Tabel. 2.19
Data Landasan Container Dan Bak Sampah (Tps)
Kota Yogyakarta Tahun 2005

No	Kecamatan	Landasan Container	Bak Sampah (TPS)	Bak Sampah (TPSS) M3	Ket.
1	Mantrijeron	-	-	17	
2	Kraton	-	1	7	
3	Mergangsan	-	4	11	
4	Umbulharjo	2	5	12	
5	Kotagede	2	-	-	
6	Gondokusuman	4	10	18	
7	Danurejan	2	16	9	
8	Pakualaman	1	-	4	

9	Gondomanan	-	4	8	
10	Ngampilan	1	1	2	
11	Wirobrajan	-	2	10	
12	Gedongtengen	-	5	-	
13	Jetis	1	2	3	
14	Tegalrejo	2	-	11	
	Jumlah	15	50	112	

Sumber Data : Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pemakaman Kota Yogyakarta

BAB III LANDASAN PELAKSANAAN

Rencana Aksi Daerah Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas Kota Yogyakarta merupakan kumpulan upaya dan aksi yang dirumuskan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas sesuai kebutuhan dan memenuhi standar yang baku. Dokumen RAD ini diperlukan karena telah diamanahkan di dalam rencana pembangunan nasional dan daerah, sehingga kedudukan RAD ini lebih kuat. Dukungan landasan pelaksanaan terhadap RAD, mempunyai komitmen agar mampu dilaksanakan secara efektif, terpadu dan berkelanjutan.

A. LANDASAN NASIONAL

Sebagai bagian dari upaya pembangunan sarana dan prasarana berkualitas di Kota Yogyakarta, maka pelaksanaannya tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Rencana Jangka Menengah Nasional 2005-2009.

1. UU No. 4 Tahun 2002 tentang Perumahan dan Permukiman

Penyelenggaraan perumahan dan dan permukiman diarahkan untuk mengusahakan dan mendorong terwujudnya kondisi setiap orang atau keluarga di Indonesia yang mampu bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan perumahannya yang layak dan terjangkau dalam lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya masyarakat dan lingkungan yang berjati diri, mandiri dan produktif.

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang diprogramkan sebagai bagian dari proses pembangunan berkelanjutan. Karenanya sangat diperlukan dukungan sumber daya yang tepat dan memadai baik berupa sumber daya alam, sumber daya buatan maupun sumber daya manusia.

Untuk itu peranan pemerintah lebih sebagai fasilitator dan pendorong upaya pemberdayaan bagi berlangsungnya seluruh rangkaian proses penyelenggaraan perumahan dan permukiman.

Keswadayaan masyarakat dibutuhkan dalam upaya memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau secara mandiri sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan mendasar manusia dalam rangka pengembangan jati diri dengan kualitas lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan.

2. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Pendayagunaan sumber daya air ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil.

Pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai.

3. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

4. RPJPN 2005-2025

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. RPJP Nasional sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk jangka waktu 20 tahun ke depan, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Peran pemerintah akan lebih difokuskan pada perumusan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana, sementara peran swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana akan makin ditingkatkan terutama untuk proyek-proyek yang bersifat komersial. Kerja sama dengan swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana diarahkan untuk (a) menyediakan sarana dan prasarana transportasi untuk pelayanan distribusi komoditi perdagangan dan industri serta pergerakan penumpang dan barang, baik dalam lingkup nasional maupun internasional; (b) menghilangkan kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan serta efektivitas dan efisiensi tenaga listrik; (c) meningkatkan teledensitas

pelayanan telematika masyarakat pengguna jasa; dan (d) memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

Pembangunan prasarana sumber daya air diarahkan untuk mewujudkan fungsi air sebagai sumber daya sosial (social goods) dan sumber daya ekonomi (economic goods) yang seimbang melalui pengelolaan yang terpadu, efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan sehingga dapat menjamin kebutuhan pokok hidup dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan diwujudkan melalui pendekatan pengelolaan kebutuhan (demand management) yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan, pengonsumsi air, dan pendekatan pengelolaan pasokan (supply management) yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air. Pengelolaan prasarana sumber daya air diarahkan untuk mewujudkan peningkatan keandalan layanan melalui kemitraan dengan dunia usaha tanpa membebani masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, dan memerhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Selain itu, pola hubungan hulu-hilir akan terus dikembangkan agar pola pengelolaan yang lebih berkeadilan dapat tercapai. Pengembangan dan penerapan sistem pemanfaatan terpadu (conjunctive use) antara air permukaan dan air tanah akan digalakkan terutama untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah. Pengendalian daya rusak air mengutamakan pendekatan nonkonstruksi melalui konservasi sumber daya air dan keterpaduan pengelolaan daerah aliran sungai. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan terus diupayakan tidak hanya pada saat bencana, tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pasca bencana.

Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah; membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional; serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Untuk itu, pembangunan transportasi dilaksanakan dengan mengembangkan jaringan pelayanan secara antarmoda dan intramoda; menelaraskan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan transportasi yang memberikan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif; mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan; meningkatkan iklim kompetisi secara sehat agar dapat meningkatkan efisiensi dan memberikan alternatif bagi pengguna jasa dengan tetap mempertahankan keberpihakan pemerintah sebagai regulator terhadap pelayanan umum yang terjangkau kepada masyarakat; menyediakan pelayanan angkutan umum massal di daerah perkotaan yang didukung pelayanan pengumpan, yang

aman, nyaman, tertib, terjangkau dan ramah lingkungan serta bersinergi dengan kebijakan tata guna lahan; serta meningkatkan budaya berlalu lintas yang tertib dan disiplin. Untuk pelayanan transportasi di daerah perbatasan, terpencil, dan perdesaan dikembangkan sistem transportasi perintis yang berbasis masyarakat (community based) dan wilayah. Untuk mendukung daya saing dan efisiensi angkutan penumpang dan barang diarahkan pada perwujudan kebijakan yang menyatukan persepsi dan langkah para pelaku penyedia jasa transportasi dalam konteks pelayanan global; mempercepat dan memperlancar pergerakan penumpang dan barang melalui perbaikan manajemen transportasi antarmoda; meningkatkan pembangunan jalan bebas hambatan pada koridor-koridor strategis; meningkatkan pangsa angkutan barang melalui kereta api, angkutan barang antarpulau, baik melalui sistem Ro-Ro maupun angkutan laut konvensional yang didukung oleh peningkatan peran armada nasional serta angkutan komoditi khusus dengan moda transportasi udara (fresh good and high value); mengembangkan sistem transportasi nasional yang andal dan berkemampuan tinggi yang bertumpu pada aspek keselamatan, dan keterpaduan antarmoda, antarsektor, antarwilayah, aspek sosial budaya, dan profesionalitas sumber daya manusia transportasi serta menerapkan dan mengembangkan teknologi transportasi yang tepat guna, hemat energi, dan ramah lingkungan. Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya, seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan melalui pendekatan tanggap kebutuhan (demand responsive approach) dan pendekatan terpadu dengan sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya air, serta kesehatan.

5. RPJMN 2005-2009

RPJMN 2005-2009 diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia ditandai dengan menurunnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; berkurangnya kesenjangan antarwilayah, termasuk meningkatnya pengelolaan pulau-pulau kecil terdepan; meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk sumber daya manusia di bidang kelautan yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup. Kondisi itu dicapai dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim yg lebih

kondusif, termasuk membaiknya infrastruktur. Percepatan pembangunan infrastruktur lebih didorong melalui peningkatan peran swasta dengan meletakkan dasar-dasar kebijakan dan regulasi serta reformasi dan restrukturisasi kelembagaan, terutama untuk sektor transportasi, energi dan kelistrikan, serta pos dan telematika. Bersamaan dengan itu dilaksanakan revitalisasi kelembagaan pusat-pusat pertumbuhan yang memiliki lokasi strategis, antara lain kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan andalan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, antara lain, ditandai oleh meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG) yang diarahkan untuk membangun bangsa yang berkarakter cerdas, adil dan beradab, berkepribadian nasional, tangguh, kompetitif, bermoral, dan berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong-royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi iptek; meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan; meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak; dan mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

B. LANDASAN REGIONAL

1. RPJPD 2007-2026

Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dalam 20 tahun ke depan diarahkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan perumahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya diarahkan kepada: (i) penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh sarana dan prasarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri dan efisien; (ii) penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya yang mandiri, mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan; (iii) pembangunan perumahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.
2. Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendorong transaksi perdagangan sebagai sumber pergerakan orang, barang dan jasa yang menjadi pangsa pasar bisnis transportasi melalui political trading yang saling menguntungkan; menciptakan jaringan pelayanan secara inter dan antarmoda angkutan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi;

menyelaraskan semua peraturan daerah baik yang mencakup investasi maupun penyelenggaraan jasa transportasi untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkenan; mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan mulai dari tahap perencanaan, pembangunan dan pengoperasiannya; menghilangkan segala macam bentuk monopoli agar dapat memberikan alternatif pilihan bagi pengguna jasa; mempertahankan keberpihakan pemerintah sebagai regulator terhadap pelayanan kepada masyarakat; menyatukan persepsi dan langkah para pelaku penyedia jasa transportasi dalam konteks global services; membangun fasilitas angkutan publik untuk daerah perkotaan.

3. Pembangunan taman-taman kota dan ruang publik perlu diperluas dan melibatkan peran aktif masyarakat termasuk para pengusaha.

2. RPJMD 2007-2011

Pembangunan infrastruktur adalah bagian integral dari pembangunan kota merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi infrastruktur seperti jaringan jalan, jaringan transportasi, jaringan drainase, persampahan, sumber daya air dan pelayanan air bersih, jaringan air limbah serta sarana prasarana lainnya masih belum mengimbangi perkembangan dinamika masyarakat terutama di wilayah pengembangan. Berkurangnya kualitas infrastruktur dan tertundanya pembangunan infrastruktur akan memperlambat perekonomian daerah.

Kondisi lingkungan permukiman di Kota Yogyakarta umumnya berwujud perkampungan yang berfungsi tidak sekedar tempat tinggal namun juga tempat produksi dan berkarya serta berinteraksi. Keterbatasan lahan kota tidak cukup memberikan ruang bagi upaya pemenuhan permukiman layak huni yang terjangkau. Pilihan alternatif pengembangan permukiman secara vertikal merupakan salah satu upaya penambahan unit rumah yang kondusif terhadap tata ruang kota serta pembangunan dan pengelolaan pasarana dasar lingkungan yang efisien.

Kebijakan pembangunan sarana prasarana dilakukan dengan pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan atau komunitas. Diharapkan akan tercipta Kota Yogyakarta yang bersih, sehat, indah dan nyaman yang dimulai dari lingkungan wilayah/kampung. Melalui pendekatan ini, maka partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilannya.

Sesuai konteks Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta, maka pembangunan sarana prasarana akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, yang dalam hal ini difasilitasi bersama melalui Sekretariat Bersama Kartamantul. Penyediaan sarana prasarana air bersih perpipaan,

drainase, jalan dan transportasi, manajemen pengelolaan sampah, optimalisasi Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dan penataan ruang perkotaan, akan menjadi kunci penting lima tahun mendatang.

Pengembangan sistem transportasi merupakan kebutuhan mendesak untuk jangka waktu lima tahun mendatang. Beberapa tahun terakhir ini kondisi transportasi publik di Perkotaan Yogyakarta sudah tidak layak lagi. Perbaikan sistem transportasi masal akan dimulai dengan pendekatan dimana masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan biaya dikeluarkan dalam menggunakan transportasi masal atau buy the service. Upaya ini perlu didukung dengan regulasi yang mampu mendorong dan memberikan insentif pada masyarakat untuk menggunakan angkutan umum masal dan regulasi emisi gas buang.

Mewujudkan pembangunan prasarana dan sarana berkualitas dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Tersedianya sarana dan prasarana dasar publik yang memadai.
2. Meningkatnya kualitas penataan kawasan sesuai peraturan
3. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas sarana prasarana publik.
4. Meningkatnya fungsi kampung sebagai tempat berinteraksi masyarakat yang utuh.
5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana-prasarana dasar permukiman dan perkotaan
6. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat.
7. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) dan ruang publik yang cukup nyaman dan indah sebagai tempat bermain dan rekreasi keluarga.

Dalam mencapai tujuan tersebut di atas dilaksanakan dengan kebijakan:

1. Menyediakan sarana dan prasarana dasar publik yang memadai di dalam kota dan di daerah perkotaan bekerjasama dengan daerah tetangga melalui Sekber Kartamantul maupun pihak swasta.
2. Meningkatkan penataan kawasan secara konsisten sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
3. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas sarana prasarana publik.
4. Meningkatkan fungsi kampung sebagai subyek pembangunan berbasis kewilayahan dan tempat berinteraksi masyarakat yang utuh baik pada aspek sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan.
5. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana-prasarana dasar permukiman dan perkotaan.

BAB IV
RENCANA AKSI PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA
KOTA YOGYAKARTA

a. **PRIORITAS**

Dalam mencapai tujuan tersebut di atas dilaksanakan dengan kebijakan:

1. Menyediakan sarana dan prasarana dasar publik yang memadai di dalam kota dan di daerah perkotaan bekerjasama dengan daerah tetangga melalui Sekber Kartamantul maupun pihak swasta.
2. Meningkatkan penataan kawasan secara konsisten sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
3. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas sarana prasarana publik.
4. Meningkatkan fungsi kampung sebagai subyek pembangunan berbasis kewilayahan dan tempat berinteraksi masyarakat yang utuh baik pada aspek sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan.
5. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana-prasarana dasar permukiman dan perkotaan.
6. Kebijakan memperbaiki mutu lingkungan hidup untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.
7. Kebijakan Memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius, sosial budaya dan kearifan lokal ke dalam proses pembangunan

Program yang dilaksanakan adalah :

1. Program Perbaikan/ Pemeliharaan Saluran Irigasi dan Drainase
Sasaran program :
Berkurangnya genangan air sebesar 50%.
2. Program Pengembangan Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Rinci Kawasan
Sasaran program :
Meningkatnya produk rencana detail tata ruang dan rencana rinci sebesar 86%
3. Program Rebah/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Sasaran program :
Meningkatnya penanganan jalan rusak sebesar 18%
4. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Sasaran program :
Meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai kebutuhan sebesar 30%

5. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu-lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
Sasaran program :
Meningkatnya jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang direhabilitasi terhadap keseluruhan prasarana dan fasilitas LLAJ sebesar 30%
6. Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas
Sasaran program :
Meningkatnya ketaatan pada peraturan teknis operasional kendaraan dan angkutan darat sebesar 30%
7. Program Pengelolaan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Permukiman, Pemeliharaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman
Sasaran program :
Meningkatnya pengelolaan prasarana dasar permukiman sebesar 10% dan jumlah rumah yang layak huni menjadi 90%.
8. Perbaikan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
Sasaran program :
Meningkatnya penerangan jalan umum untuk jalan kampung dan lingkungan berjumlah 36.000 titik atau 100% sudah memperoleh penerangan jalan umum.
9. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Sasaran program :
Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas sebesar 30%
10. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam
Sasaran program :
Waktu tanggap paling lama penanggulangan bencana alam dari 3 jam menjadi 30 menit
11. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
Sasaran program :
Waktu tanggap paling lama penanggulangan kebakaran dari 15 menit menjadi 10 menit
12. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Sasaran program :
Meningkatnya cakupan layanan persampahan dari 80 % menjadi 85 %.
13. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah
Sasaran program :
Meningkatnya cakupan layanan air limbah dari 20 % - 25 %
14. Program Pengelolaan Ruang terbuka Hijau
Sasaran program :
Meningkatnya perbandingan Ruang Terbuka Hijau dengan luas wilayah

b. UPAYA DAN RENCANA AKSI

Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana tidak hanya berfokus pada upaya penyediaan kebutuhan publik semata. Aspek lain yang menjadi perhatian utama adalah penyediaan sarana dan prasarana yang berada dalam kerangka '*city beautification*', yaitu upaya memperindah kota dengan meningkatkan sarana dan prasarana melalui peningkatan aspek kualitas dan aplikasi estetika kota.

Gambar 4.1



Sumber Data : Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta

Beberapa sarana dan prasarana pusat kota dan sudut-sudut jalan utama diberi aplikasi penerangan (*city lighting*) untuk memberi penerangan serta memperindah dan mempercantik kota. Jembatan rel kereta di Kewek-Kleringan diberi aplikasi hiasan lampu beras (*rice light*). Lampu yang menjurai ramai bagai tanaman menjalar jatuh akan memperindah dan menutupi serta melingkupi jembatan rel kereta, sehingga fungsi prasarana jembatan tetap aktif sementara aspek estetika dan fungsi penerangan juga dapat tampil. Seperti terlihat pada Gambar 4.1. Jembatan rel kereta Kleringan dihiasi *rice light*.

Gambar 4.2



Sumber Data : Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta

Aplikasi *rice light* juga ditampilkan pada pohon-pohon peneduh yang berdaun lebat pada pusat kota hingga pada malam hari terlihat menjurai jatuh indah sehingga mengurangi kesenyapan malam hari. Pada Gambar 4.2. terlihat perindang di Depan Gedung Agung dihiasi lampu hias *rice light* terjurai.

Gambar 4.3



Sumber Data : Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta

Penerangan pada jembatan layang (*fly over*) diberi lampu pengarah (*spot lighting*) pada sisi trotoar untuk lebih menghidupkan dan memberi cahaya arah jalan. Kombinasi lampu PJU, lampu hias pada tiang-tiang, serta lampu spot akan memberi efek gebyar kemeriahan prasarana jalan dan kawasan sekitar. Pada

jalan layang Dr. Sutomo dihiasi lampu gapura dan lampu hias kecil yang menjadi pengarah di trotoar jalan layang seperti terlihat pada Gambar 4.3.

Gambar 4.4

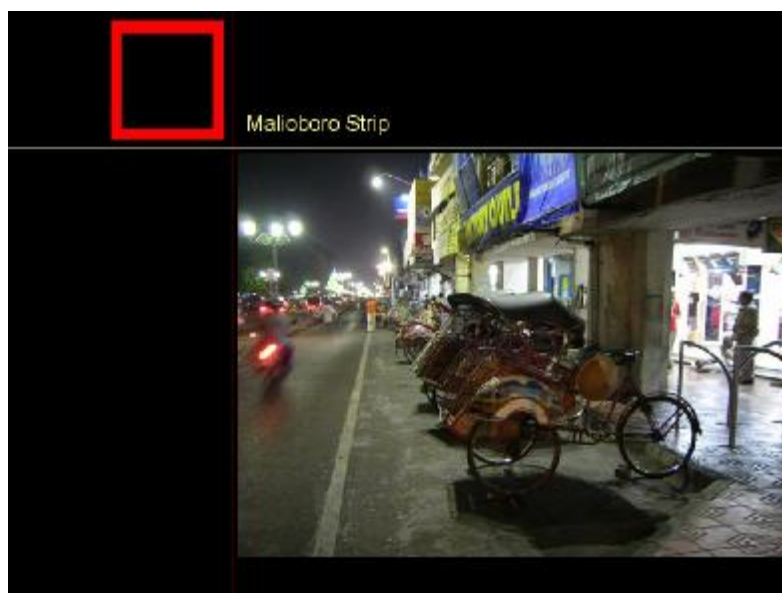


Sumber Data : Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta

Kawasan Kotagede yang mempunyai karakteristik khusus dan arsitektural bangunan khas menjadi *genious loci* potensi wisata kawasan. Perpaduan bentuk dan *fasade* bangunan serta fungsi bangunan pada saat ini memberi ruang kegiatan pariwisata kawasan untuk berkembang. Potensi karakter kawasan ini akan dipertegas dengan pembangunan *landmark* (tetenger) berupa rancangan *gate* (pintu masuk) kawasan yang memberi impresi kawasan khas bersejarah yang mempunyai nilai sosial-kultural-historis.

Rancangan *gate* dipadu dengan penerangan (*lighting*) yang atraktif serta papan informasi penunjuk *entry* kawasan untuk mempertegas batas delineasi kawasan dan atmosfir spasial kawasan. Diharapkan kawasan Kotagede juga akan lebih meriah atraktif pada suasana malam hari dengan demikian juga akan memberi kontribusi pertumbuhan ekonomi kawasan. Pada Gambar 4.4 terlihat gapura jembatan Tegalgendu mempunyai karakteristik khas kawasan dihiasi dengan bola lampu di atas tugu gapura.

Gambar 4.5



Sumber Data : Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta

Jalur pedestrian kawasan Malioboro dilakukan aplikasi *lighting* pada lorong *arcade*. Penyinaran pada lorong arcade akan memberi efek pencahayaan menerus searah dan serasi dengan jalur Malioboro sebagai ikon wisata Kota Yogyakarta. Pada suasana malam hari diharapkan akan tetap hidup, sehingga ketika kegiatan ekonomi berhenti pada saat pertokoan tutup, kawasan akan tetap bersuasana hidup. Hal demikian akan menambah rasa *secure* bagi wisatawan atau penduduk penikmat suasana malam kota. Pada Gambar 4.5. terlihat arcade pedestrian Jalan Malioboro diberi penerangan penuh sehingga pada suasana malam hari ketika pertokoan sudah tutup beraktifitas kawasan Malioboro masih terang benderang.

Gambar 4.6



Sumber Data : Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta

Kawasan Jembatan Kewek – Kleringan dilakukan penataan kawasan melalui kegiatan pembangunan taman, air mancur, serta permainan *lighting* pada

prasarana dan sarana kawasan. Jantung kawasan pusat kota ini ditata semenarik mungkin sebagai *eyes caught* Kota Yogyakarta.

Taman Abu Bakar Ali ditata menjadi kawasan *rest* dan wisata kuliner dengan orientasi *view* pada taman dan air mancur kawasan Kleringan. Tampak pada Gambar 4.6. Kawasan taman Kleringan – Abu Bakar Ali banyak diberi penerangan penuh dan taman berkontur (lansekap) berserta air mancur.

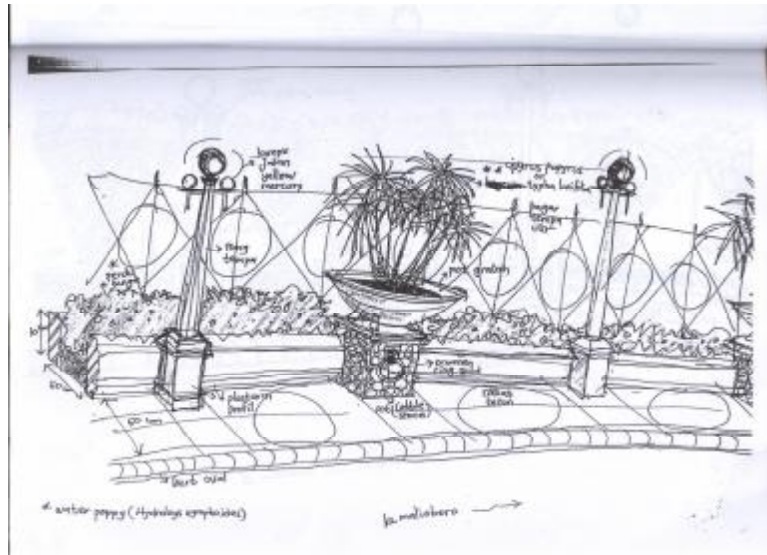
Gambar 4.7



Sumber Data : Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta

Penghijauan kota sebagai pendukung program dalam kerangka '*city beautification*' dilakukan dengan menambah jejalur hijau berupa tanaman perindang-peneduh, pengarah jalur jalan, serta taman-taman kota. Bentuk penghijauan ruang kota selain tanaman pohon dan taman, dapat juga berbentuk pot-pot tanaman serta pergola perindang pedestrian. Kedepan bentuk pergola dan pot akan menjadi alternatif perancangan penghijauan kota yang mempunyai keterbatasan lahan perkotaan yang ada. Pada Gambar 4.7 terlihat jalan yang penuh pohon perindang-peneduh di kawasan Kotabaru yang merupakan warisan masa lalu yang tetap dilestarikan dan ditingkatkan.

Gambar 4.8

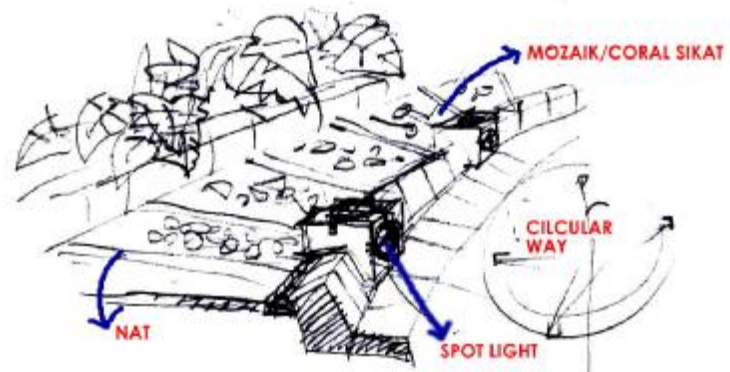


Sumber Data : Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta

Penggunaan rancangan bentuk penghijauan seperti pot-pot tanaman mengaplikasikan desain yang atraktif tidak hanya sebatas penggunaan pot-pot fabrikasi yang selama ini ada.

Bentuk desain yang atraktif akan memunculkan keindahan dan keserasian dengan lingkungan sekitar. Penerapan desain-desain yang atraktif demikian didukung dengan material yang estetik dan kuat tahan terhadap permasalahan ancaman iklim, cuaca dan kerawanan sosial. Pada Gambar 4.8. tampak rancangan pot yang menggunakan tekstur batu alam dan keramik produk lokal yang atraktif.

Gambar 4.9

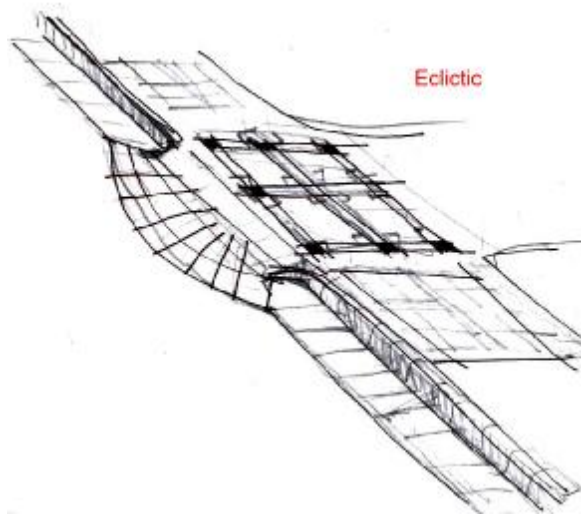


Sumber Data : Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta

Prasarana pedestrian seperti trotoar menggunakan aplikasi desain yang humanis seperti penggunaan sudut-sudut yang *eklektik*, tidak bersudut tajam, serta

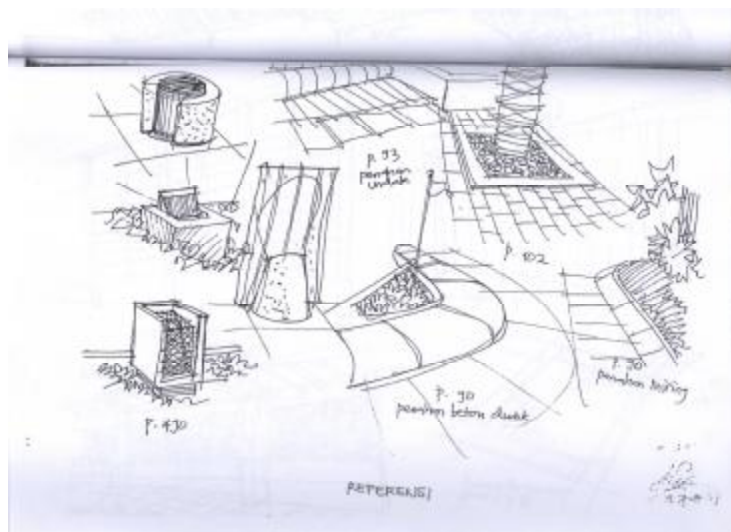
dimensi konstruksi yang lebih tepat dengan ukuran yang sesuai dengan masyarakat. Gambar 4.9. memperlihatkan rancangan trotoar pedestrian yang tidak bersudut tajam serta menggunakan aplikasi material campuran kerikil dan keramik yang menjadi tekstur tidak licin. Begitu juga terlihat pada Gambar 4.10 dan 4.11 tampak desain trotoar yang lebih humanis menggunakan rancangan eklektik.

Gambar 4.10



Sumber Data : Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta

Gambar 4.11



Sumber Data : Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta

Gambar 4.12



Sumber Data : Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta

Revitalisasi kawasan Kotagede dilakukan dengan pengembalian rancangan *fasade* Pasar Kotagede pada desain masa lalu. Upaya ini sebagai pengungkapan ekspresi kawasan '*tempo doeloe*' yang tetap eksis dan tetap mempunyai fungsi ekonomi hingga saat ini.

Aktivitas perdagangan dan kegiatan lainnya tetap berlangsung dan semakin ditingkatkan dengan pengkondisian kawasan yang tetap kondusif terhadap perkembangan ekonomi kota dan kawasan namun dengan tanpa meninggalkan ciri khas arsitektural dan spasial kawasan. Gambar 4.12 memperlihatkan foto Pasar Kotagede yang kuno pada jaman dahulu dan pada Gambar 4.13 tampak kondisi Pasar Kotagede masa kini yang direncanakan akan direvitalisasi.

Gambar 4.13



Sumber Data : Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta

Gambar 4.14



Sumber Data : Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta

Pembangunan peningkatan sarana dan prasarana dilakukan terpadu dengan memperhatikan sinergi fungsi dan konstruksi, seperti pembangunan instalasi pembersih sampah sungai. Alat demikian selain berfungsi sebagai normalisasi kebersihan sungai juga sebagai pengangkut muatan sampah ke TPS (Tempat Pembuangan Sementara) untuk selanjutnya diangkut menggunakan *dump truck* seterusnya pada akhirnya diangkut menuju ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Piyungan, Bantul. Pada Gambar 4.14 tampak rencana penggunaan alat mekanis pengeruk sampah sungai untuk ditransfer pada depo sementara penampungan sampah.

Gambar 4.15



Sumber Data : Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta

Pada lingkungan permukiman dilaksanakan pembangunan sarana dan prasarana komunitas dengan melibatkan dan meningkatkan upaya keswadayaan masyarakat. Pada tingkatan komunitas diperlukan pembangunan peningkatan sarana dan prasarana air bersih, air limbah, serta peningkatan kesehatan lingkungan seperti kegiatan rehabilitasi MCK umum dengan peningkatan material konstruksi yang lebih menunjang sanitasi masyarakat yaitu aplikasi lantai keramik. Pada Gamabr 4.15. tampak perbaikan lingkungan melalui peningkatan kualitas sarana MCK komunitas.

c. MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN

Kegiatan/ Pekerjaan	Rencana Tahunan				
	2007	2008	2009	2010	2011
1. TRANSPORTASI					
<u>a. Public Transport</u>					
- pengadaan bus	20 unit	10 unit	10 unit	8 unit	6 unit
- pemeliharaan bus	-	20 unit	30 unit	40 unit	48 unit
- pengadaan halte	34 unit	unit	unit	unit	unit
<u>b. Manajemen Traffic</u>					
- uji coba arus lalu lintas	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi
- pemasangan rambu lalu lintas	unit	unit	unit	unit	unit
- pemasangan lampu traffic	unit	unit	unit	unit	unit
- rasionalisasi simpang	4 lokasi	6 lokasi	6 lokasi	6 lokasi	6 lokasi

2. LANSEKAP (Peruangan Ruang Luar)					
<u>a. Penghijauan Ruang Jalan</u>					
- penataan taman	37 titik	6 titik	-	47 titik	4 titik
- penghijauan jalan dan devider	10 titik	2 titik	2 titik	23 titik	2 titik
<u>b. Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Hias</u>	230 titik	270 titik	280 titik	290 titik	300 titik
<u>c. Perbaikan Trotoar</u>	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%
<u>d. Penertiban Pengguna Trotoar Jalan</u>	50 unit	50 unit	50 unit	50 unit	50 unit
<u>e. Kebersihan Sungai</u>	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi
<u>f. Penertiban Bangunan</u>	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit
<u>g. Support Bentuk Bangunan Depan</u>	12 obyek	12 obyek	12 obyek	12 obyek	12 obyek

3. JALAN					
a. Rehab/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%
b. Pemasangan PJU Jalan	200 titik	400 titik	400 titik	400 titik	400 titik

4. SALURAN					
a. Saluran air hujan & Irigasi					
b. Pembangunan perbaikan SAH & Irigasi	1830 m	1830 m	1930 m	1730 m	1930 m
c. Pembangunan & Perbaikan Talud	300 m	300 m	300 m	400 m	400 m

5. SALURAN LIMBAH

a. Pengembangan Saluran Limbah					
- Induk	-	3000 m	3000 m	-	-
- Lateral	2100 m	2700 m	2100 m	2500 m	2500 m
- Penggelontor	-	1000 m	900 m	-	-
b. IPAL Communal					
- Pembuatan	3 unit	3 unit	5 unit	5 unit	5 unit
- Optimalisasi	-	20 unit	12 unit	-	-

6. PERSAMPAHAN

a. Sarana penampungan sampah	182 unit	154 unit	344 unit	162 unit	150 unit
b. Rehabilitasi transfer depo	3 unit	2 unit	2 unit	-	-
c. Sarana pengangkutan sampah	57 unit	43 unit	28 unit	31 unit	31 unit
d. Pembangunan TPA			----- 1 lokasi -----		

7. Perumahan Permukiman

a. Penyediaan Rumah					
- <u>pembangunan rusuna</u>	1 twin blocks	1 twin blocks	1 twin blocks	1 twin blocks	1 twin blocks
- penyediaan dana revolving untuk perbaikan rumah	-	29 KK	50 KK	50 KK	50 KK
b. Perbaikan Sarpras Permukiman					
- <u>pembangunan dan Perbaikan MCK</u>	161 unit	200 unit	124 unit	20 unit	20 unit
- konblokisasi jalan setapak	12.475 m2	1.000 m2	1.500 m2	1.200 m2	1.000 m2
- pembangunan dan pemeliharaan sanitasi limbah sederhana					
- pembangunan dan pemeliharaan SAH sederhana	1.500 m'	1.500 m'	1.200 m'	1.000 m'	1.000 m'
- <u>PJU Lingkungan</u>	1.400 titik	4.200 titik	4.200 titik	4.200 titik	4.400 titik
- Penyediaan tanah untuk interaksi sosial					
- Penghijauan lingkungan					
- Penyehatan lingkungan					
- Keamanan					
- Perilaku interaksi sosial					
- Kesenian					
- Pemberdayaan usaha masyarakat					
- UKM, Koperasi, dsb					
- Penambahan Jaringan pipa					
- Perbaikan kualitas air bersih non perpipaan	90 unit	150 unit	160 unit	160 unit	156 unit

BAB V PELAKSANAAN

Rencana Aksi Daerah Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas ini merupakan dokumen aksi yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan sarana prasarana berkualitas. Disamping disusun oleh semua pemangku kepentingan, RAD pembangunan sarana prasarana berkualitas mempunyai landasan yang kuat serta saling mendukung antara RAD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta. Kunci keberhasilan pelaksanaan RAD pembangunan sarana prasarana berkualitas adalah diperlukannya komitmen bersama yang serius, terpadu, terkoordinasi dan konsisten serta dukungan anggaran dan SDM yang memadai.

A. MEKANISME

Mekanisme penyusunan hingga pelaksanaan RAD pembangunan sarana prasarana berkualitas dirumuskan menjadi beberapa langkah, yaitu:

- a. Penyusunan program prioritas untuk pembangunan sarana prasarana berkualitas, dijabarkan ke dalam rencana aksi yang memuat kegiatan, instansi terkait dan pendanaan.
- b. Penjabaran program pembangunan sarana prasarana berkualitas ke dalam rencana kegiatan diturunkan menjadi rencana tahunan tiap-tiap instansi terkait.
- c. Pengalokasian anggarannya bersumber dari APBD dan APBN serta didukung lembaga donor nasional maupun internasional maupun swadaya masyarakat.
- d. Koordinasi instansional di tingkat daerah, antar daerah yang tergabung dalam aglomerasi perkotaan, serta dengan pusat.
- e. Pengawasan, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- f. Komitmen semua pihak dalam pelaksanaan rencana aksi akan menghasilkan tujuan yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan sarana prasarana berkualitas.

B. PENDANAAN

Pelaksanaan RAD pembangunan sarana prasarana berkualitas harus didukung dengan pendanaan yang dianggarkan secara rutin setiap tahun. Hal ini disebabkan karena kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran program prioritas pembangunan sarana prasarana berkualitas masuk di dalam rencana tahunan

SPKPD. Sehingga pengalokasian secara rutin tersebut bisa menjadi jaminan dalam pelaksanaan rencana aksi secara konsisten dan berkelanjutan.

Sumber dana pelaksanaan RAD pembangunan sarana prasarana berkualitas bersumber pada APBD, APBN dan dukungan swasta serta lembaga donor baik lokal maupun internasional. Mengingat keterbatasan anggaran dari alokasi pemerintah daerah dan pusat, maka untuk mengantisipasi keterbatasan tersebut dukungan dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan.

C. KELEMBAGAAN

Dalam pelaksanaan RAD pembangunan sarana prasarana berkualitas ini perlu diatur sebuah bentuk kelembagaan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengikat, memperkuat dan menjamin pelaksanaannya oleh semua pihak dalam mencapai tujuan RAD. Dukungan kelembagaan itu antara lain:

- a. RAD pembangunan sarana prasarana berkualitas akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk menjaga konsistensi, keterpaduan dan keterikatan dalam pelaksanaannya
- b. Melibatkan stake holder dalam jejaring perumusan rencana aksi yaitu pemerintah, pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan lembaga lainnya

Dalam tatanan kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan, masyarakat harus dilibatkan dan diberikan ruang serta kemudahan.

D. INDIKATOR

Untuk menjaga akuntabilitas sarana prasarana berkualitas dalam kebijakan pembangunan, akan dikembangkan indikator capaian yang terukur dan masyarakat sipil akan dilibatkan dalam melakukan pengawasan melalui mekanisme pemantauan pembangunan di semua tataran, mulai dari pusat sampai ke desa.

Tingkat efisiensi dan keberhasilan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana berkualitas di Kota Yogyakarta dapat diukur dari indikator-indikator berikut:

- (1) Tersusunnya jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan integrasi antarmoda berbasis pada efisiensi dan keadilan.
- (2) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana publik yang mantap di berbagai sektor.
- (3) Peningkatan aksesibilitas sarana dan prasarana publik berdasarkan asas keadilan sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata ke segenap lapisan masyarakat.

- (4) Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat.
- (6) Tersedianya ruang publik yang cukup nyaman dan indah sebagai tempat bermain dan rekreasi keluarga.

BAB VI PENUTUP

Pembangunan sarana prasarana berkualitas yang tertuang dalam rencana aksi daerah, merupakan komitmen semua pihak dalam melaksanakan pembangunan sarana prasarana berkualitas. Rencana aksi tersebut dituangkan dalam program prioritas serta Kuncinya adalah peningkatan kesadaran dan melaksanakan komitmen bersama bagi upaya pembangunan sarana prasarana berkualitas yang ada di Kota Yogyakarta.

Hal ini bukan menjadi tanggung jawab pemerintah semata tetapi juga masyarakat, swasta dan semua pihak. Mengingat rencana aksi pembangunan sarana prasarana berkualitas ini berisi program prioritas yang implementatif, terarah, terpadu dan berkesinambungan, maka dapat diperbaharui mengikuti kondisi perkembangan yang terjadi.

Yogyakarta, 08 Desember 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO